



Analisis multidimensional konflik agraria di Desa Lhok Gajah dalam perspektif sosiologi

Thamara Putriani Br Matanari¹, Welhendri Azwar¹, Muhamad Jamil²

¹Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

²STAI Yayasan Tarbiyah Islamiyah Padang

Informasi Artikel

Article history:

Dikirimkan 20/06/2024

Direvisi 18/07/2024

Diterima 03/09/2024

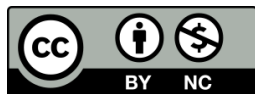
Kata kunci:

Konflik Agraria
Struktur Fungsional
Interpretatif
Konflik
Kritis

Keywords:

Agrarian Conflict
Functional Structure
Interpretative
Conflict
Critical

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Abstrak

Masyarakat marginal seringkali menghadapi kendala-kendala struktural yang menghambat akses mereka terhadap sumber daya, layanan, dan kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya. Mereka cenderung mengalami diskriminasi, penindasan, dan ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga diperlukan pemberdayaan untuk mengurangi keterpinggiran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikator masyarakat Desa Lhok Gajah dikatakan marginal melalui perspektif konflik, fungsionalisme, interpretatif, dan kritis. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode Analisis Tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria di Desa Lhok Gajah, Aceh Barat Daya, mencerminkan kompleksitas dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan berbeda. Perspektif konflik menyoroti ketidakadilan struktural dalam akses sumber daya, fungsionalisme melihat konflik sebagai ancaman stabilitas sosial, teori interpretatif menekankan konstruksi sosial, sedangkan teori kritis mengkritik ketidakadilan struktural sebagai akar konflik agraria di masyarakat.

Abstract

Marginalized communities often face structural barriers that hinder their access to the same resources, services, and opportunities as other communities. They tend to experience discrimination, oppression, and inequality in various aspects of life, making empowerment necessary to reduce such marginalization. This study aims to analyze indicators of marginalization in the community of Lhok Gajah Village through the perspectives of conflict, functionalism, interpretivism, and critical theory. The study employs a field research approach using thematic analysis. The findings reveal that agrarian conflicts in Lhok Gajah Village, Southwest Aceh, reflect the complexity of social, economic, and political dynamics involving various actors with differing interests. The conflict perspective highlights structural injustice in access to resources; functionalism views conflict as a threat to social stability; interpretive theory emphasizes social construction; while critical theory critiques structural injustice as the root of agrarian conflict in society.

Penulis Korespondensi

Thamara Putriani Br Matanari
Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Balai Gadang, Kec. Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586
Email: tamaraputriani@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini, pemberdayaan masyarakat marginal menjadi fokus penting dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Masyarakat marginal terdiri dari kelompok-kelompok yang secara sistematis diabaikan dalam proses pembangunan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Kelompok-kelompok ini seringkali terdiri dari minoritas etnis, kelompok berpendapatan rendah, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan mereka yang tinggal di daerah terpencil atau terpinggirkan (Raihan, 2022). Masyarakat marginal seringkali menghadapi kendala-kendala struktural yang menghambat akses mereka terhadap sumber daya, layanan, dan kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya. Mereka cenderung mengalami diskriminasi, penindasan, dan ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Karakteristik ini mencakup rendahnya tingkat pendapatan, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta minimnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka (Anam et al., 2016).

Di Desa Lhok Gajah, masyarakat marginal adalah mereka yang memiliki lahan pertanian yang sempit, tidak memiliki sertifikat tanah, atau bekerja sebagai buruh tani tanpa kepemilikan lahan. Kehidupan mereka seringkali berada di bawah garis kemiskinan, dengan akses yang terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi (Sulistiyowati et al., 2023). Kondisi marginalisasi di desa ini diperparah oleh adanya konflik agraria yang berkepanjangan. Tanpa kepastian hukum atas tanah yang mereka garap, masyarakat marginal sering kali menghadapi ancaman penggusuran, intimidasi, dan kekerasan. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ekonomi mereka, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan sosial yang lebih luas (Thohir, 2024).

Dampak dari konflik agraria sangat terasa bagi masyarakat marginal di Desa Lhok Gajah. Kehilangan lahan pertanian berarti hilangnya sumber penghidupan utama. Banyak keluarga yang akhirnya jatuh dalam kemiskinan lebih dalam karena tidak mampu lagi menggarap tanah yang menjadi sumber pendapatan mereka. Selain itu, penggusuran paksa sering kali mengakibatkan trauma dan ketidakstabilan sosial di tingkat komunitas (Firdaus, 2023), bahkan anak-anak dari keluarga yang terdampak konflik agraria seringkali harus putus sekolah karena orang tua mereka tidak mampu lagi membiayai pendidikan. Akses terhadap layanan kesehatan juga menjadi semakin sulit karena pendapatan keluarga menurun drastis. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang sulit untuk diputus.

Pemberdayaan masyarakat marginal menjadi kunci dalam upaya mengatasi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Melalui pemberdayaan, masyarakat marginal diberi kesempatan untuk mengembangkan kapasitas, meningkatkan akses terhadap sumber daya, serta berperan aktif dalam proses pembangunan. Dengan memberdayakan masyarakat marginal, tidak hanya tercipta inklusi sosial yang lebih luas, tetapi juga terbentuknya komunitas yang lebih tangguh dan berdaya (Alfitri et al., 2016).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) yang mengandalkan keterlibatan langsung peneliti dalam masyarakat atau lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah mengidentifikasi, mencatat, dan mengumpulkan informasi melalui interpretasi mendalam terhadap hubungan antara penelitian

dan fenomena yang diteliti. Metode yang digunakan adalah Analisa Tematik, dimana menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan yang muncul dari data (Braun & Clarke, 2006). Analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengorganisasi dan menginterpretasi data kualitatif secara sistematis, membantu memahami hubungan dan fenomena yang kompleks. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran dan penjelasan tentang temuan lapangan terkait bagaimana kondisi masyarakat di Desa Lhok Gajah dikatakan marginal. Penelitian ini mengandalkan pengumpulan data di suatu latar ilmiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk memahami indikator masyarakat Desa Lhok Gajah dikatakan marginal melalui perspektif teori Konflik, Fungsionalisme, Interperatif dan Kritis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Masyarakat Marginal Secara Konseptual

Marginalisasi adalah fenomena dalam masyarakat yang senantiasa membuat seseorang terpinggirkan dan tidak memiliki kuasa penuh atas kehidupan sendiri maupun sumber daya yang tersedia. Marginalisasi sendiri dalam wujud pembahasannya berasal dari kata dasar marginal yang artinya terpinggirkan. Itulah sebabnya, kadang kala marginalisasi membuat sebagian besar masyarakat di beberapa daerah tidak ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Marginalisasi dapat dibedakan menjadi lima jenis, yaitu marginalisasi sosial, marginalisasi ekonomi, marginalisasi politik, marginalisasi pendidikan, dan marginalisasi psikologis.

Dalam sejarahnya, istilah marginalisasi dipergunakan secara luas di Eropa dan pertama kali digunakan di Prancis. Pada saat itu, marginalisasi dianggap sebagai proses pemblokiran atas berbagai hak, peluang, dan sumber daya yang tersedia dan dialami individu maupun kelompok tertentu. Pada umumnya, kelompok marginalisasi ditolak keterlibatannya dalam kegiatan ekonomi, politik, budaya, sosial, dan agama. Setidaknya, terdapat faktor penyebab timbulnya masyarakat yang termarginalisasi, salah satunya unsur budaya yang berbeda atau adanya perbedaan dalam kuasa atas ilmu pengetahuan yang dimilikinya.

Menurut Wahyudi (Wahyudi, 2015), marginalisasi adalah tindakan mengasingkan, meminggirkan, atau melemahkan kuasa kelompok minoritas atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan negara dan kelompok dominan, sehingga setiap kelompok marginal akan tunduk pada kelompok dominan. Menurut Pierre Bourdieu (Bourdieu, 2018), seorang sosiolog Prancis, mengembangkan konsep masyarakat marginal sebagai kelompok yang terpinggirkan dalam proses produksi dan distribusi sumber daya. Dia menyoroti akses terbatas mereka terhadap modal ekonomi, budaya, dan sosial. Dalam pandangannya, masyarakat marginal sering kali memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya dan kesempatan.

Sedangkan menurut Robert Chambers (Robert Chambers, 1984), seorang ahli pembangunan, juga memandang masyarakat marginal sebagai kelompok yang sering kali tidak diakui dalam proses pembangunan dan kebijakan. Mereka menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Sementara itu, Paul Farmer (Paul Farmer, 2003), seorang antropolog dan dokter, melihat masyarakat marginal sebagai kelompok yang secara

historis, ekonomis, dan politis terpinggirkan. Faktor-faktor seperti ras, etnisitas, status sosial, atau lokasi geografis sering memainkan peran dalam mengakibatkan ketidaksetaraan ini.

Semua pandangan ini menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketidaksetaraan dalam masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa Marginalisasi itu seperti ketidakseimbangan dalam hidup orang-orang di suatu daerah. Mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal pekerjaan, pendidikan, atau hal lainnya seperti orang lain. Ini bisa membuat mereka terjebak dalam kemiskinan dan sulit untuk maju. Kadang-kadang, orang-orang yang terpinggirkan ini terpaksa melakukan hal-hal yang salah atau bahkan ilegal untuk bertahan hidup. Untuk mengubah hal ini, diperlukan bantuan dari pemerintah, organisasi masyarakat, dan perusahaan untuk memberikan peluang yang adil kepada semua orang dan membantu mereka memperbaiki kehidupan mereka (Alfitri et al., 2016).

3.2 Masyarakat Desa Lhok Gajah

Desa Lhok Gajah terletak di Kecamatan Blang Pidie, salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh. Desa ini merupakan bagian dari wilayah pesisir barat daya Aceh yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, memberikan karakteristik geografis dan ekonomi yang khas. Desa Lhok Gajah berada di dataran yang relatif datar dengan beberapa area perbukitan. Topografi desa ini mendukung aktivitas pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama bagi penduduknya. Letaknya yang strategis di dekat pusat kecamatan Blang Pidie memudahkan akses ke berbagai fasilitas dan layanan yang lebih lengkap.

Masyarakat Desa Lhok Gajah mayoritas adalah etnis Aceh, yang memegang teguh tradisi dan adat istiadat lokal. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah Bahasa Aceh, dengan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan pengantar dalam pendidikan. Populasi desa ini terdiri dari beberapa ratus hingga ribuan jiwa, dengan struktur keluarga yang erat dan kehidupan sosial yang aktif. Kehidupan sosial dan budaya di Desa Lhok Gajah sangat kental dengan tradisi Aceh. Kegiatan adat seperti kenduri, perayaan keagamaan, dan upacara adat rutin diadakan dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Islam adalah agama mayoritas, dan aktivitas keagamaan seperti shalat berjamaah, pengajian, dan peringatan hari besar Islam sangat aktif di desa ini. Masjid menjadi pusat kegiatan sosial dan spiritual bagi masyarakat.

Ekonomi Desa Lhok Gajah didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan. Petani di desa ini menanam berbagai komoditas, termasuk padi, kelapa sawit, dan karet. Pertanian menjadi tulang punggung ekonomi desa, meskipun beberapa warga juga terlibat dalam peternakan dan perikanan sebagai sumber penghasilan tambahan. Hasil bumi dari pertanian dan perkebunan tidak hanya untuk konsumsi lokal tetapi juga dijual ke pasar di kecamatan atau kabupaten. Desa Lhok Gajah memiliki infrastruktur dasar yang cukup memadai untuk mendukung kehidupan sehari-hari warganya. Jalan utama yang menghubungkan desa dengan pusat kecamatan Blang Pidie umumnya sudah beraspal, meskipun beberapa jalan di dalam desa masih berupa jalan tanah atau semi-permanen. Fasilitas umum seperti sekolah dasar, masjid, dan puskesmas tersedia, meskipun untuk layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih lengkap, warga harus menuju ke kecamatan atau kabupaten. Pendidikan di Desa Lhok Gajah dimulai dari sekolah dasar yang ada di desa. Untuk pendidikan menengah, siswa biasanya harus pergi ke sekolah di pusat kecamatan Blang Pidie. Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan

terus dilakukan oleh pemerintah dan komunitas, termasuk melalui berbagai program peningkatan kapasitas guru dan fasilitas sekolah.

Desa Lhok Gajah memiliki potensi untuk mengembangkan sektor pariwisata berbasis komunitas, yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, karena memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang besar, dan itu bisa dikembangkan lebih lanjut dengan teknik pertanian modern dan diversifikasi tanaman, dan didukung dengan keindahan alam dan budaya yang dimiliki. Desa Lhok Gajah menghadapi beberapa tantangan, salah satunya adalah konflik agraria yang sering melibatkan pengambilalihan lahan oleh investor besar. Konflik agraria di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, awalnya terjadi pada tahun 2014. Konflik ini mulai mencuat ketika pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang memberikan izin kepada investor untuk mengelola lahan yang selama ini diusahakan oleh masyarakat setempat. Keputusan ini memicu ketidakpuasan dan protes dari masyarakat desa yang merasa hak mereka atas tanah yang telah dikelola turun-temurun diabaikan. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian bagi petani yang bergantung pada lahan mereka untuk mata pencaharian. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan akses ke layanan dasar juga menjadi hambatan bagi perkembangan desa.

3.3 Awal Mula Penyebab Konflik Agraria di Desa Lhok Gajah

Konflik agraria di Kecamatan Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang terjadi di Desa Lhok Gajah, merupakan salah satu dari banyak konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Kasus ini melibatkan komunitas petani kecil yang mengalami marginalisasi akibat kebijakan agraria dan dampak globalisasi. Sejak zaman kolonial, penguasaan tanah di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan. Pada masa tersebut, tanah-tanah subur sering kali diambil alih oleh pemerintah kolonial untuk perkebunan besar, sementara penduduk lokal, termasuk di Aceh, sering kali terpinggirkan. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia melanjutkan kebijakan agraria dengan tujuan untuk redistribusi tanah melalui program Reforma Agraria. Namun, pelaksanaan program ini sering kali tidak efektif dan tidak merata. Investor, terutama perusahaan perkebunan besar seperti kelapa sawit, memerlukan lahan luas untuk mengembangkan usaha mereka. Ini menyebabkan pengambilalihan lahan-lahan yang sebelumnya digunakan oleh petani kecil.

Pada masa Orde Baru, kebijakan agraria di Indonesia cenderung menguntungkan perusahaan besar dan investor dibandingkan petani kecil. Pemerintah memberikan konsesi lahan kepada perusahaan perkebunan besar, terutama untuk komoditas seperti kelapa sawit dan karet. Di Desa Lhok Gajah, lahan yang sebelumnya digunakan oleh petani kecil untuk pertanian subsisten mulai diambil alih untuk perkebunan kelapa sawit dan kegiatan komersial lainnya. Pemerintah sering kali mengeluarkan kebijakan yang mendukung investasi besar di sektor perkebunan, terutama untuk komoditas ekspor. Kebijakan ini terkadang mengabaikan hak-hak petani kecil. Pemerintah daerah dan pusat juga sering kali memberikan izin konsesi lahan kepada perusahaan tanpa konsultasi atau kompensasi yang memadai kepada petani yang sudah lama mengelola lahan tersebut.

Petani kecil di Desa Lhok Gajah mulai mengalami marginalisasi ketika lahan-lahan mereka diambil alih untuk proyek perkebunan kelapa sawit. Mereka kehilangan sumber penghidupan utama karena lahan pertanian yang produktif beralih fungsi. Di banyak daerah di

Indonesia, termasuk Aceh, terdapat konflik antara hak ulayat (hak adat) dan klaim negara atas tanah. Tanah yang dianggap milik adat oleh masyarakat sering kali dianggap sebagai tanah negara oleh pemerintah. Banyak petani kecil yang mengelola tanah tanpa memiliki sertifikat resmi. Mereka mengandalkan hak turun-temurun atau penguasaan adat yang tidak diakui secara hukum oleh negara. Karena kurangnya kompensasi yang adil dan tidak adanya upaya untuk merelokasi atau memberikan lahan pengganti yang layak membuat petani kecil semakin terpuruk.

Kehilangan lahan pertanian berdampak besar pada kesejahteraan ekonomi petani kecil. Mereka kehilangan mata pencaharian dan sumber pangan utama, yang meningkatkan kemiskinan dan kerawanan pangan di daerah tersebut. Konflik yang berlarut-larut juga menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik di Desa Lhok Gajah dan sekitarnya. Sudah banyak hal yang dilakukan oleh Komunitas petani untuk menuntut hak mereka, mereka mulai melakukan perlawanan terhadap pengambilalihan lahan, dan bentuk perlawanan ini berupa protes, demonstrasi, atau bahkan tindakan langsung untuk mengambil kembali lahan mereka, tetapi tetap saja ketidakjelasan status kepemilikan sering menyebabkan rebutan lahan antara petani dan investor. Akibat legalitas yang lemah tanah yang dikelola petani kecil mungkin dianggap tanah negara atau lahan kosong karena kurangnya sertifikat resmi, meskipun secara *de facto* telah dikelola oleh petani selama bertahun-tahun.

3.4 Analisis Konflik Agraria di Desa Lhok Gajah Dalam Perspektif Struktur Fungsional, Interpretatif, Konflik, dan Kritik

Konflik agraria di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, merupakan fenomena kompleks yang dapat dipahami secara mendalam dengan mengintegrasikan berbagai perspektif teoretis, yaitu perspektif struktur fungsional, interpretatif, konflik, dan kritis. Masing-masing perspektif ini memberikan wawasan unik yang saling melengkapi untuk menggambarkan akar penyebab, dinamika, dan dampak dari konflik tersebut.

a. Perspektif Struktur Fungsional (Robert Merton)

Dari sudut pandang struktur fungsional tulisan ini mengacu kepada pandangan menurut Robert Merton. Teori Struktur Fungsional dari Robert Merton menekankan pada cara struktur sosial mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat (Merton, 1968). Menurut Merton, setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi yang mendukung stabilitas dan kelangsungan sistem sosial secara keseluruhan (Merton, 1968). Merton mengembangkan konsep-konsep penting seperti fungsi manifes, yaitu fungsi yang disengaja dan diakui secara terbuka, dan fungsi laten, yaitu fungsi yang tidak disengaja dan tidak diakui. Selain itu, Merton juga mengakui adanya disfungsi sosial, di mana elemen-elemen tertentu dalam masyarakat dapat mengganggu stabilitas sosial (Merton, 1968).

Merton juga memperkenalkan konsep strain theory, yang menjelaskan bagaimana tekanan sosial yang dihasilkan oleh ketidaksesuaian antara tujuan budaya dan sarana yang tersedia untuk mencapainya dapat menghasilkan perilaku menyimpang (Merton, 1968). Misalnya, dalam masyarakat yang sangat menekankan pada kesuksesan materi, individu yang tidak memiliki akses ke sarana legal untuk mencapai tujuan ini mungkin beralih ke cara-cara ilegal (Turner, 2002). Penjelasan ini menunjukkan bahwa struktur fungsionalisme Merton

memperkaya pemahaman kita tentang dinamika sosial dengan menunjukkan bagaimana struktur sosial dan institusi berfungsi untuk mempertahankan stabilitas dan kelangsungan masyarakat, namun juga memperhatikan potensi adanya disfungsi dan perilaku menyimpang dalam sistem tersebut (Wallace & Alison Wolf, 2006).

Dapat dilihat dari konflik agrarian di Desa Lhok Gajah, bahwa tanah di Desa Lhok Gajah memiliki fungsi sosial yang sangat vital. Tanah tidak hanya berfungsi sebagai sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat, tetapi juga sebagai simbol identitas dan warisan budaya. Ketika pemerintah memberikan izin kepada investor untuk mengambil alih lahan, fungsi ini terganggu, menciptakan ketidakstabilan dalam tatanan sosial. Kehilangan akses ke tanah menyebabkan masyarakat kehilangan mata pencaharian dan merusak keteraturan sosial yang ada, memicu kerusuhan dan ketidakpuasan.

b. Perspektif Interpretative (Peter L. Berger & Thomas Luckmann)

Teori atau perspektif interpretatif dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann berfokus pada bagaimana realitas sosial dibentuk melalui interaksi sosial sehari-hari (Berger & Thomas Luckmann, 2016). Menurut mereka, realitas sosial adalah konstruksi yang dihasilkan melalui proses sosial, di mana individu-individu secara kolektif menciptakan dan memelihara makna. Salah satu konsep utama dalam teori ini adalah "habitualisasi," yang merupakan proses di mana tindakan berulang menjadi pola yang diterima secara luas dalam masyarakat (Berger & Thomas Luckmann, 2016). Proses ini menghasilkan "institusionalisasi," di mana tindakan yang terhabitualisasi dilembagakan dan dianggap sebagai bagian integral dari struktur sosial (Berger & Thomas Luckmann, 2016). Misalnya, praktik-praktik sehari-hari yang diulang-ulang dalam masyarakat akhirnya menjadi institusi sosial seperti pendidikan dan hukum (Wallace & Wolf, 2010).

Berger dan Luckmann juga memperkenalkan konsep "internalisasi," di mana individu mengadopsi realitas sosial yang dilembagakan sebagai kenyataan subjektif mereka sendiri (Berger & Thomas Luckmann, 2016). Melalui proses sosialisasi, individu belajar dan menerima peran serta norma-norma sosial yang sudah ada, sehingga memperkuat konstruksi sosial yang ada (Ritzer & Stepnisky, 2018). Teori interpretatif ini menekankan bahwa realitas sosial tidak bersifat objektif atau tetap, melainkan dinamis dan terus-menerus dibentuk kembali melalui interaksi sosial (Berger & Thomas Luckmann, 2016). Dengan demikian, pemahaman tentang masyarakat harus mempertimbangkan cara-cara di mana individu berinteraksi dan menciptakan makna dalam kehidupan sehari-hari (Giddens, 1984).

Selain itu, Berger dan Luckmann menjelaskan bahwa "dunia kehidupan" (lifeworld) individu dipenuhi dengan makna yang dibentuk oleh interaksi sosial yang konstan (Berger & Thomas Luckmann, 2016). Mereka berpendapat bahwa realitas sosial memiliki dua dimensi: subjektif dan objektif. Realitas subjektif adalah dunia yang dialami secara individual, sementara realitas objektif adalah dunia yang dilembagakan dan diterima secara luas dalam masyarakat (Berger & Thomas Luckmann, 2016). Memahami konflik agraria melalui perspektif interpretative menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, dapat dilihat bagaimana masyarakat Desa Lhok Gajah memaknai tanah dan konflik tersebut. Bagi mereka, tanah bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan kultural yang mendalam. Pengambilalihan tanah oleh investor dilihat sebagai ancaman terhadap warisan nenek moyang mereka dan identitas komunitas. Melalui interaksi sehari-hari dan narasi yang mereka bangun,

masyarakat mengonstruksi realitas di mana mereka merasa terancam dan termarginalkan. Narasi sejarah dan tradisi digunakan untuk memperkuat klaim mereka atas tanah, menegaskan hak mereka dalam mempertahankan tanah tersebut.

c. Perspektif Konflik (Karl Marx)

Teori Konflik menurut Karl Marx berfokus pada peran konflik sosial dalam perubahan dan perkembangan masyarakat (Marx, 1844). Marx berpendapat bahwa sejarah semua masyarakat adalah sejarah perjuangan kelas, di mana konflik antara kelas-kelas sosial yang berbeda adalah kekuatan pendorong utama perubahan sosial (Marx & Engels, 1848). Dalam analisisnya, Marx melihat masyarakat kapitalis sebagai arena konflik antara kelas borjuis (pemilik alat produksi) dan kelas proletar (pekerja) (Marx, 1867).

Marx menegaskan bahwa sistem kapitalis menciptakan ketidakadilan dan eksploitasi, di mana kelas borjuis mengeksploitasi kelas proletar untuk keuntungan mereka sendiri (Marx, 1867). Eksploitasi ini, menurut Marx, terjadi karena nilai lebih yang dihasilkan oleh pekerja diambil oleh pemilik modal sebagai laba. Konflik ini akhirnya akan mengarah pada kesadaran kelas di kalangan proletar, yang kemudian akan memicu revolusi untuk menggulingkan sistem kapitalis dan menggantikannya dengan sosialisme, di mana alat produksi dimiliki secara kolektif (Marx & Engels, 1848). Marx juga memperkenalkan konsep alienasi, di mana pekerja menjadi terasing dari produk kerja mereka, proses produksi, rekan kerja, dan potensi manusiawi mereka sendiri sebagai akibat dari sistem kapitalis. Alienasi ini memperdalam konflik kelas dan mempercepat proses revolusioner (Marx, 1844).

Perspektif konflik menurut Karl Marx memberikan wawasan tentang ketidakadilan struktural dan ketimpangan kekuasaan yang melandasi konflik agraria ini. Pemerintah dan investor memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar dibandingkan masyarakat lokal, menciptakan ketidakseimbangan yang signifikan. Pengambilalihan tanah oleh investor bukan sekadar pergeseran kepemilikan, tetapi bentuk eksploitasi di mana keuntungan ekonomi investor diutamakan di atas kesejahteraan masyarakat lokal. Perspektif ini mengungkap bahwa konflik tersebut bukan hanya tentang tanah, tetapi juga tentang perjuangan melawan dominasi dan penindasan.

d. Perspektif Kritis (Antonio Gramsci)

Teori perspektif kritis menurut Antonio Gramsci adalah salah satu pendekatan penting dalam studi sosial dan politik yang menekankan pada analisis hegemoni dan ideologi dalam masyarakat (Hobsbawm, 2011). Gramsci, seorang pemikir Marxis Italia, mengembangkan konsep ini dengan menggambarkan bagaimana kelas penguasa mempertahankan kekuasaannya tidak hanya melalui kekuatan dan paksaan, tetapi juga melalui dominasi budaya dan ideologis (Boggs, 1976). Gramsci memperkenalkan konsep "hegemoni" untuk menjelaskan bagaimana negara dan kelas penguasa memelihara kontrol sosial dengan cara menyebarkan ide-ide dan nilai-nilai yang menguntungkan mereka dan membuatnya tampak alami atau tak terbantahkan (Gramsci, 1971). Hegemoni ini dicapai melalui institusi seperti sekolah, media massa, dan gereja, yang semuanya berperan dalam membentuk pandangan dunia masyarakat (Bates, 1975).

Menurut Gramsci, salah satu cara utama kelas penguasa mempertahankan hegemoni adalah melalui apa yang disebutnya sebagai "blok sejarah" (Forgacs, 1988). Blok sejarah adalah aliansi kelas-kelas sosial yang berbeda yang bersatu di bawah ideologi dominan yang

disebarkan oleh kelas penguasa (Crehan, 2002). Ini memastikan bahwa berbagai kelompok sosial merasa terhubung dan mendukung status quo, meskipun mereka mungkin memiliki kepentingan material yang berbeda (Gramsci, 1971). Gramsci juga menekankan pentingnya "intelektual organik" dalam mempertahankan dan menantang hegemoni (Sassoon, 1980). Intelektual organik adalah mereka yang berasal dari kelas pekerja dan terlibat dalam pengorganisasian serta penyebaran kesadaran kritis di antara kelas pekerja (Simon, 1985). Mereka berbeda dari "intelektual tradisional," yang cenderung mempertahankan struktur kekuasaan yang ada melalui pekerjaan mereka di institusi-institusi seperti universitas dan media. Untuk melawan hegemoni yang ada, Gramsci menekankan pentingnya "perang posisi," yang merupakan perjuangan panjang dan terus-menerus untuk mengubah kesadaran masyarakat dan membangun hegemoni alternatif yang mendukung kelas pekerja. Ini melibatkan pengorganisasian di berbagai tingkat masyarakat, termasuk dalam budaya, politik, dan ekonomi, untuk menciptakan kesadaran kritis dan solidaritas di antara kelompok-kelompok tertindas (Thomas, 2009).

Secara keseluruhan, teori perspektif kritis Gramsci memberikan alat analisis yang kuat untuk memahami bagaimana kekuasaan dan kontrol dipertahankan dalam masyarakat kapitalis melalui dominasi ideologis dan budaya (Morton, 2007). Ini juga memberikan panduan untuk strategi-strategi perlawanan yang dapat digunakan oleh kelas pekerja dan kelompok tertindas lainnya untuk mengubah struktur sosial yang ada. Jika dilihat dari Perspektif kritis menurut Antonio Gramsci membawa analisis lebih jauh dengan mengeksplorasi ideologi dan struktur ekonomi yang mendukung ketidakadilan ini. Kebijakan agraria dan struktur ekonomi yang ada cenderung menguntungkan elit politik dan investor, sementara masyarakat lokal dipinggirkan. Narasi pembangunan dan modernisasi yang digunakan untuk melegitimasi pengambilalihan tanah adalah bentuk hegemoni ideologis yang memperkuat dominasi kelompok kuat dan menindas kepentingan masyarakat lokal. Perspektif kritis juga mengidentifikasi perlawanan masyarakat sebagai upaya untuk menantang struktur kekuasaan yang tidak adil dan memperjuangkan hak mereka.

Dengan mengintegrasikan perspektif struktur fungsional, interpretatif, konflik, dan kritis, kita mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang konflik agraria di Desa Lhok Gajah. Ketidakstabilan sosial yang dihasilkan dari hilangnya tanah (struktur fungsional) dipahami melalui makna subjektif dan konstruksi sosial masyarakat (interpretatif), yang berakar pada ketidakadilan struktural dan ketimpangan kekuasaan (konflik), serta didukung oleh ideologi dominan yang memperkuat eksploitasi (kritis). Pendekatan yang holistik ini mengungkap bahwa penyelesaian konflik agraria di Desa Lhok Gajah memerlukan upaya untuk mengatasi ketidakadilan struktural dan ketimpangan kekuasaan, menghormati makna kultural dan subjektif dari tanah, dan mengembalikan fungsi sosial tanah untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, solusi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan dapat dicapai, memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa mengabaikan aspek-aspek penting dari konflik tersebut.

4. SIMPULAN

Konflik agraria di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, merupakan fenomena multidimensional yang dapat dipahami melalui berbagai perspektif,

termasuk perspektif konflik, fungsionalisme, interpretatif, kritis, dan feminisme. Kesimpulan yang komprehensif dapat diambil dengan mempertimbangkan semua perspektif tersebut yaitu: *Pertama*, Konflik Agraria sebagai Manifestasi Ketidakadilan Struktural, di mana kepentingan masyarakat lokal sering kali dikalahkan oleh kepentingan politik dan ekonomi yang lebih kuat. *Kedua*, Fungsi Sosial dan Dampak Terhadap Solidaritas, konflik agraria mencerminkan ketidakseimbangan dalam fungsi sosial masyarakat, dengan potensi untuk memperkuat atau merusak solidaritas sosial tergantung pada cara konflik tersebut dikelola. *Ketiga*, Konstruksi Makna dan Realitas Sosial, konflik agraria diinterpretasikan sebagai konstruksi makna dan realitas sosial yang terbentuk oleh interaksi kompleks antara berbagai aktor yang memiliki pemahaman, nilai, dan kepentingan yang berbeda. *Keempat*, Kritik Terhadap Ketidakadilan Struktural, dari sudut pandang teori kritis, konflik agraria merupakan kritik terhadap ketidakadilan struktural yang diperkuat oleh kekuasaan ekonomi dan politik yang tidak setara, serta hegemoni ideologis yang digunakan untuk melegitimasi pengambilalihan sumber daya alam.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri, Ahmad, A. R., & Awang, M. M. (2016). Pengenalan Masyarakat Marginal. *Pembangunan Masyarakat Marginal*, 5.
- Anam, C., Felani, M., Nurkhoiron, M., Aji, N., Firmansyah, N., Arianingtyas, R., Effendi, W., Nainggolan, Y. A. P., & Zainal Abidin. (2016). *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas Di Indonesia (Sebuah Laporan Awal)* (1st ed). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Google Books.
- Bates, T. R. (1975). Gramsci and the Theory of Hegemony. *History*, 36(2), 351–366.
- Berger, P., & Thomas Luckmann. (2016). *The Social Construction of Reality* (2 ed.).
- Boggs, C. (1976). *Gramsci's Marxism*. Pluto Press. Amazon.
- Bourdieu, P. (2018). The forms of capital. *The Sociology of Economic Life, Third Edition*, (3rd ed., pp. 78–92). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429494338>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology; In qualitative research in psychology. *Uwe Bristol*, 3(2), 77–101. <https://psychology.ukzn.ac.za/?mdocs-file=1176>
- Crehan, K. (2002). *Gramsci, Culture and Anthropology*. University of California Press. <https://search.worldcat.org/title/1010928720>
- Firdaus, M. A. (2023). Dampak Sosial Konflik Agraria. *Osf.Io*.
- Forgacs, D. (1988). The Gramsci Reader. In *Selected Writings 1926-1935*. papers3://publication/uuid/D8584552-0373-4470-BA00-19A78DDE9B95
- Giddens, A. (1984). The Constitution of Society. *Social Forces*, 66(4), 1124. <https://doi.org/10.2307/2579442>
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*.
- Hobsbawm, E. (2011). How to Change the World: Reflections on Marx and Marxism. In *Jurnal Sains dan Seni ITS* (Vol. 6, Nomor 1). Yale University Press.
- Marx, K. (1844). Economic and Philosophic Manuscripts of 1844. *Nineteenth-Century Philosophy: Philosophic Classics, Volume IV, August 1844*, 312–340. <https://doi.org/10.4324/9781003320609-19>
- Marx, K. (1867). *Das Kapital (erste Auflage)*.
- Marx, K., & Engels, F. (1848). Manifesto of the Communist Party. *Nineteenth-Century Philosophy: Philosophic Classics, Volume IV, February 1848*, 340–350. <https://doi.org/10.4324/9781315742564-9>

- Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. Free Press. Google Books.
- Morton, A. D. (2007). *Unravelling Gramsci: Hegemony and Passive Revolution in the Global Political Economy*. 258–261.
- Paul Farmer. (2003). *Pathologies of Power Health, Human Rights, and the New War on the Poor*.
- Raihan, M. L. (2022). *Sosialisasi Pemilu Oleh Relawan Demokrasi Untuk Peningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas Di Pilkada Kota Semarang 2020*. 1–29.
- Ritzer, G., & Stepnisky, J. N. (2018). *Sociological Theory* (10 ed.). Pustaka Belajar.
- Robert Chambers. (1984). Rural Development: putting the last first. In *International Affairs* (Vol. 60, Nomor 3).
- Sassoon, A. S. (1980). *Gramsci's Politics*. St. Martin's Press. <https://www.amazon.com/Gramscis-Politics-Anne-Showstack-Sassoon/dp/0312342381>
- Simon, R. (1985). *Gramsci's Political Thought: An Introduction*. London: Lawrence & Wishart 1982. <https://www.abebooks.com/9780853155591/Gramscis-Political-Thought-Introduction-Simon-0853155593/plp>
- Sulistiyowati, C. A., Afiff, S. A., Baiquni, M., & Siscawati, M. (2023). Potensi Pertanian Berbasis Dukungan Komunitas Sebagai Solusi Persoalan Petani Kecil Di Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(2), 241–261.
- Thohir, M. A. (2024). *Pembangunan , Kaum Miskin Kasus Penggusuran Kampung Kentingan Baru , Kota Solo*. 350–372.
- Thomas, P. (2009). *The Gramscian Moment Philosophy, Hegemony and Marxism*. https://brill.com/display/title/14765?qt-qt_product_details=0
- Turner, J. H. (2002). Sociological Theory. In *Reference Reviews* (7 ed.). <https://doi.org/10.1108/rr.2002.16.7.11.333>
- Wahyudi, C. (2015). *Marginalisasi dan Keberadaban Masyarakat* (F. R. Aliyverdana (ed.); ed. 1). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wallace, R. A., & Alison Wolf. (2006). *Contemporary sociological theory: expanding the classical tradition* (6 ed.). Prentice Hall.
- Wallace, R. A., & Wolf, A. (2010). *Contemporary Sociological Theory: Expanding the Classical Tradition* (5 ed.). Prentice Hall, 1999.